

SKRIPSI
ANALISIS PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN
BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019-2023

*(ANALYSIS OF BUDGET PERFORMANCE IMPLEMENTATION
OF EXPENDITURE AT THE GENERAL ELECTION
COMMISSION OF MAMUJU REGENCY IN 2019-2023)*



NURAFNI SAGITA
C02 19 358

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE
2025

**ANALISIS PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN
BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019-2023**



**NURAFNI SAGITA
C02 19 358**

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah disetujui Oleh

Pembimbing I

Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP. 199308202019031016

Pembimbing II

Indra Basir, SE., M.Ak
NIP.199106192022031003

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi**

Nuraeni M. S.Pd., M.Ak
NIP. 198312032019032006

ANALISIS PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019-2023

Dipersiapkan dan disusun oleh:

NURAFNI SAGITA
C02 19 358

Telah diuji dan diterima panitia ujian
Pada tanggal 26 Mei 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji

1. Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
2. Indra Basir, SE., M.Ak
3. Muhammad Ihsan Ansari, SE., M.Ak
4. Sufyan Amirullah, SE., M.Ak
5. Putri Ayu Wulandari, S.AK., M.Acc

Jabatan

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Tanda Tangan

1)

2)

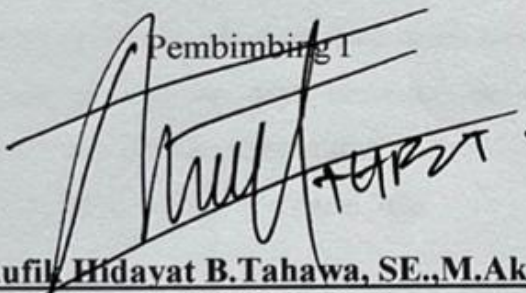
3)

4)

5)

Telah disetujui Oleh :

Pembimbing I


Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak
NIP. 19930820 201903 1 016

Pembimbing II


Indra Basir, SE., M.Ak
NIP. 19910619 202203 1 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi




Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurafni Sagita

Nim : C02 19 358

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS PELAKSANAAN KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2019-2023

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia, menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 26 Mei 2025

Yang membuat pernyataan


Nurafni Sagita

ABSTRAK

Nurafni Sagita, Analisis Pelaksanaan Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2023 dibimbing oleh Bapak Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak dan Bapak Indra Basir.,S.E.,M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kinerja anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju pada tahun 2019-2023. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dokumenter, wawancara dan observasi. Lokasi penelitian bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju yang berlokasi di Jl. H.Mustafa Ratjo (kompleks BTN Graha Nusa, Mamuju). Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan pelaksanaan kinerja anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tahun 2019-2023 dan sampel pada penelitian ini yaitu data realisasi dan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah dengan teknik analisis data yaitu analisis varians belanja daerah, analisis pertumbuhan belanja, analisis rasio keserasian belanja operasional, analisis rasio belanja modal terhadap total belanja, rasio efektivitas dan rasio efisiensi belanja,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju tahun 2019–2023 secara umum berada dalam kondisi yang baik. Hal ini tercermin dari pencapaian target anggaran yang relatif sesuai dengan perencanaan serta realisasi anggaran yang terkendali. Pertumbuhan anggaran selama periode penelitian menunjukkan kondisi yang fluktuatif atau naik-turun, yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional rutin maupun non-operasional, khususnya kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum dan aktivitas pendukung lainnya. Dari sisi efisiensi, anggaran KPU Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan efisien karena realisasi anggaran tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dalam membatasi pengeluaran agar tetap sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan pemborosan.

Kata Kunci: Kinerja Anggaran Belanja, Komisi Pemilihan Umum

ABSTRACT

Nurafni Sagita, Analysis of Budget Performance Implementation at the General Election Commission of Mamuju Regency in 2019-2023 supervised by Mr. Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak and Mr. Indra Basir., S.E., M.Ak.

This study aims to determine the implementation of budget performance at the General Election Commission of Mamuju Regency in 2019-2023. The analysis method used is a qualitative descriptive method using documentary data collection techniques, interviews and observations. The location of the study is at the General Election Commission of Mamuju Regency located on Jl. H. Mustafa Ratjo (BTN Graha Nusa complex, Mamuju). The population in this study is the report on the implementation of the budget performance of the General Election Commission of Mamuju Regency in 2019-2023 and the sample in this study is the data on the realization and budget of regional original revenue (PAD) and regional expenditure with data analysis techniques, namely regional expenditure variance analysis, expenditure growth analysis, analysis of the ratio of harmony of operational expenditure, analysis of the ratio of capital expenditure to total expenditure, effectiveness ratio and efficiency ratio of expenditure.

The results of this study indicate that the budget performance of the General Election Commission (KPU) of Mamuju Regency in 2019–2023 was generally in good condition. This is reflected in the achievement of budget targets that were relatively in line with planning, as well as controlled budget realization. Budget growth during the research period showed a fluctuating or inconsistent trend, influenced by both routine operational and non-operational activities, particularly the implementation of elections and other supporting activities. In terms of efficiency, the budget of KPU Mamuju Regency can be categorized as efficient since the budget realization did not exceed the allocated ceiling. This condition demonstrates good financial management capability in limiting expenditures to remain aligned with actual needs without causing waste.

Keywords: *Budget Performance Implementation, General Election Performance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran adalah salah satu komponen utama pelaksanaan rencana atau agenda. Perencanaan yang matang diperlukan untuk mencapai tujuan rencana sebelum dapat direalisasikan, salah satunya adalah anggaran (Mamengko, 2022). Peran anggaran bagi pemerintah merupakan alat untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Penganggaran dalam lingkungan sektor publik merupakan suatu hal yang kompleks dibandingkan dengan sektor swasta yang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan, dimana penganggaran merupakan urusan rahasia tetapi hal ini tidak berlaku untuk apa yang sudah disusun dalam sektor publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat untuk dapat dievaluasi dan diperbaiki dalam jangka waktu yang akan datang sehingga pemerintah dapat melakukan reformasi di bidang administrasi publik, termasuk sistem anggaran, dengan transparansi yang demikian.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang bertanggung jawab untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerah, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk mengelola keuangan daerah dan menggunakan hasil pengelolaan untuk memaksimalkan potensi yang ada dan mendorong pembangunan daerah (UU No.23 Tahun 2014).

Instansi pemerintah berpedoman pada tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) selalu berkaitan dengan kinerja anggaran yang menjadi pengukuran dan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran yang terdapat dalam laporan keuangan. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah kegiatan/program yang direncanakan telah sesuai dan mencapai keberhasilan yang ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dari proses penetapan indikator kinerja agar unit kerja sektor publik menerima informasi untuk memantau hasil kinerjanya dalam menghasilkan outcome dan output kepada masyarakat. Pengukuran kinerja sangat penting untuk membantu para pengambil keputusan dalam memantau dan memperbaiki kinerja serta berfokus pada tujuan instansi dan untuk menilai akuntabilitas instansi bahwa anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta pimpinan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Ketika menilai suatu anggaran, apakah anggaran itu baik atau buruk perlu ditinjau mengenai apa yang telah dihasilkan oleh anggaran tersebut. Hal tersebut sesuai dengan teori anggaran berbasis kinerja atau teori *performance based budgeting* (PBB). *Performance-Based Budgeting* (PBB) merupakan pendekatan yang menghubungkan alokasi sumber daya dengan pencapaian hasil atau kinerja tertentu (Ahmad, 2025). Dalam akuntansi manajemen, penerapan PBB dapat dilakukan dengan menetapkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang jelas, mengukur pencapaian target, dan mengintegrasikan evaluasi hasil ke dalam proses pengambilan keputusan.

Teori ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya anggaran. Dalam PBK, alokasi dana dilakukan berdasarkan hasil program yang berkontribusi pada tujuan organisasi. Manfaat yang dihasilkan dideskripsikan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. PBK menggunakan bukti untuk memaksimalkan alokasi dana untuk program yang berhasil dan menjauhi program yang tidak berhasil. Dalam PBK, indikator kinerja digunakan untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.

Berdasarkan PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP), belanja didefinisikan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara dalam periode tahun anggaran berjalan yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan pemerintah tidak akan memperoleh pembayarannya kembali. Belanja negara merupakan salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan. Proses belanja harus dilakukan secara terkendali oleh karena itu mekanisme belanja harus disusun seefisien dan seefektif mungkin. Auditor pemerintah lebih memperhatikan pada audit atas belanja, karena sebagian besar kebocoran APBN terjadi dalam pelaksanaan belanja. Kebocoran tersebut disebabkan karena adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maupun karena kurangnya pemahaman penyelenggara negara dalam melakukan proses belanja. Klasifikasi belanja pada Komisi Pemilihan Umum yaitu belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang.

Belanja yang merupakan kegiatan rutin pemerintah menjadi momok dan rentan akan kebocoran dan inefisiensi jika tidak dilakukan perencanaan, pengawasan serta pengendalian yang baik, oleh karena itu analisis belanja mutlak harus dilakukan agar menjadi dasar evaluasi, perbaikan dan koreksi kedepan. Selain itu, belanja menjadi komponen yang penting bagi masyarakat selaku pemberi pajak daerah untuk mengetahui dan menilai anggaran belanja yang dikelola pemerintah telah dilaksanakan untuk kepentingan publik, efektif dan efisien. Tetapi perlu diingat bahwa, setiap kebijakan anggaran harus memiliki laporan dalam bentuk laporan realisasi anggaran (LRA).

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi yang sangat berguna untuk menilai kinerja keuangan. Laporan realisasi anggaran menempati prioritas yang lebih tinggi daripada neraca. LRA adalah jenis laporan keuangan yang dibuat terlebih dahulu sebelum menyiapkan neraca, laporan operasi, dan laporan arus kas. Anggaran memainkan peran penting sebagai alat untuk stabilisasi, alokasi-alokasi, sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi, dan evaluasi kinerja. Demikian, LRA adalah salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan yang paling penting. Berdasarkan LRA, pembaca laporan dapat menganalisis kinerja laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis pengeluaran, dan analisis pembiayaan. Selalu ada unsur perkiraan (asumsi) saat merumuskan anggaran, dan terkadang perkiraan ini berbeda dengan yang direalisasikan dalam pelaksanaan anggaran (Jessy langi, 2022). Laporan realisasi anggaran juga dilakukan oleh instansi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya pada provinsi Sulawesi Barat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu instansi yang bertanggung jawab kepada KPU RI untuk melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, dan badan legislative lainnya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat juga bertanggungjawab dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk melaksanakan tujuan dari rencana kerja pemerintah (RKP) yang telah disusun pada awal tahun anggaran. Berikut didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri Nurjannah, 2022) mengenai anggaran dan realisasi belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019-2020 :

Tabel 1. 1Anggaran Belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat 2019-2020

Tahun	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
2019	Rp. 4.943.424.000	Rp. 18.994.521.000	Rp. 838.595.000
2020	Rp. 4.175.692.000	Rp. 2.656.356.000	Rp. 74.000.000

Sumber : (Putri Nurjannah, 2022)

Pada tahun 2019 ke tahun 2020, mengalami penurunan baik dari segi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri Nurjannah, 2022), bahwa angka tersebut belum dapat diketahui apakah termasuk pada kategori baik atau buruk. Seperti yang telah diketahui, bahwa anggaran belanja merupakan suatu anggaran yang disediakan pemerintah guna keperluan suatu instansi seperti instansi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Komisi Pemilihan Umum Pada Kabupaten Mamuju merupakan instansi yang berwenang dalam hal pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada lingkup Kabupaten Mamuju. Pada instansi seperti KPU Mamuju, tentunya diharapkan keterbukaan dalam hal kinerja anggaran sepanjang tahun 2019-2023. Berikut merupakan data mengenai rincian total anggaran belanja KPU sepanjang tahun 2019-2023 :

Tabel 1. 2 Rincian Total Anggaran Belanja KPU Kab. Mamuju 2019-2023

Tahun	Total Anggaran Belanja Pegawai	Total Anggaran Belanja Barang	Total Anggaran Belanja Modal	Total Anggaran Belanja per tahun
2019	2.437.857.000	15.905.357.000	1.239.913.000	19.583.127.000
2020	2.337.577.000	37.978.331.000	141.835.000	40.457.743.000
2021	3.049.063.000	5.017.488.000	1.002.139.000	9.068.690.000
2022	2.791.950.000	1.740.894.000	0,00	4.532.844.000
2023	2.573.487.000	19.489.820.000	1.108.630.000	23.171.937.000

Sumber: KPU Kab. Mamuju 2025

Selain itu juga, berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti terdapat nilai mengenai jumlah realisasi anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten Mamuju. Berikut realisasi anggaran sepanjang tahun 2019-2023

Tabel 1. 3 Realisasi Anggaran Belanja KPU Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2023

Tahun	Total Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (%)	Total Realisasi Anggaran Belanja Barang (%)	Total Realisasi Anggaran Belanja Modal (%)
2019	99,78%	99,80%	99,83%
2020	99,67%	74,05%	99,98%
2021	99,72%	99,18%	99,83%
2022	98,47%	98,73%	-
2023	99,60%	99,37%	99,11%

Sumber: KPU Kabupaten Mamuju, 2025

Saat ini, ketika melihat nominal yang terbilang besar dalam anggaran, tentunya memicu adanya korupsi yang dilakukan oleh pihak KPU Mamuju. Fenomena korupsi KPU Mamuju dikonfirmasi oleh *sulbar.bpk.go.id*, bahwa pada tahun 2022 terdapat 9 orang anggota KPU ditahan pada polresta Mamuju terkait kasus korupsi anggaran publikasi kampanye yang dilakukan pada tahun 2019. Tersangka menggunakan anggaran kampanye dalam melaksanakan kampanye pada tahun 2019. Fenomena berita lain yang dilansir dari *kumparan.com/sulbarkini*, bahwa tersangka kasus korupsi pada KPU Mamuju, Sulawesi Barat diserahkan kepada Kejaksaan Negeri dengan total kerugian milyaran. Berita lainnya, yaitu dilansir dari *sulbarexpress.com* bahwa pada tahun 2023 dikonfirmasi bahwa terdapat anggota KPU yang terjerat kasus korupsi anggaran media.

Dengan banyaknya fenomena terkait anggaran dari KPU, tentunya hal ini seharusnya menjadi refleksi terhadap KPU Mamuju untuk memperbaiki hal tersebut dari segi kinerja anggaran. Hal tersebut dikarenakan kinerja anggaran mempengaruhi terhadap efektifitas dari KPU Mamuju.

Maka dengan itu berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2019-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan kinerja anggaran belanja pada komisi pemilihan Umum kabupaten Mamuju pada tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kinerja anggaran belanja pada komisi pemilihan umum kabupaten Mamuju pada tahun 2019-2023?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis berguna bagi dua pihak :

1. Bagi Pembaca, untuk menambah informasi dan wawasan pengetahuan dalam penelitian mengenai pelaksanaan kinerja anggaran pada komisi pemilihan umum kabupaten Mamuju.
2. Bagi Penulis, sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang mengkaji pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai kinerja anggaran pada komisi pemilihan umum kabupaten Mamuju.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan informasi lebih dalam kepada komisi pemilihan umum kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan kinerja anggaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritik

2.1.1 Pengertian Anggaran

Penganggaran merupakan sistem perencanaan, pengendalian, dan pengawasan yang digunakan dalam secara luas untuk menjalankan tanggung jawab manajerial (Warnaningtyas, 2019). Penganggaran sebagai salah satu alat manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk memenuhi tujuan perusahaan, yaitu memuaskan pelanggan dan berhasil dalam persaingan. Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Ada beberapa pengertian yang diberikan mengenai anggaran oleh para ahli.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun oleh perusahaan bisnis/jasa secara sistematis dan terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa unit/satuan moneter atau dalam bentuk barang pada periode tertentu dimasa datang (Suhardi, 2019). Sedangkan pendapat lain

menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan (Sasongko & Parulian, 2020).

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan para ahli, dapat dipahami bahwa anggaran tidak sekadar berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan aktivitas di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis oleh suatu organisasi untuk periode tertentu di masa mendatang, yang dituangkan dalam satuan uang sebagai dasar dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja organisasi. Dengan demikian, anggaran memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Karakteristik Anggaran

Karakteristik anggaran terdiri dari (Ahmad, 2015) :

1. Dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter), walaupun angkanya berasal dari angka yang bukan satuan keuangan (misalnya unit terjual dan jumlah produksi).
2. Mencakup kurun waktu satu tahun atau dalam periode tertentu lainnya.

3. Isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan.
4. Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang akan mempunyai wewenang lebih tinggi daripada yang menyusunnya
5. Jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat diubah kecuali dalam hal khusus.
6. Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periode dan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dianalisis dan dijelaskan.

2.1.3 Jenis-jenis Anggaran

Anggaran perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran sebagai berikut menurut pendapat (Rudianto, 2016) :

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Karena itu, anggaran operasional mencakup:

a. Anggaran Pendapatan

Anggaran pendapatan merupakan rencana yang dibuat perusahaan untuk memperoleh pendapatan pada kurun waktu tertentu.

b. Anggaran Biaya

Anggaran biaya merupakan rencana biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang direncanakan.

c. Anggaran Laba

Anggaran laba adalah besarnya laba yang ingin diperoleh perusahaan di dalam suatu periode tertentu di masa mendatang. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan dan anggaran biaya.

2. Anggaran Keuangan

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan. Anggaran ini tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan. Anggaran ini merupakan pendukung upaya perusahaan untuk menghasilkan dan menjual produk perusahaan.

Sedangkan pendapat lain berpendapat bahwa jenis-jenis anggaran adalah sebagai berikut (Deddy Nordiawan, 2010:71) :

1. Anggaran operasional dan anggaran modal (*Current vs Capital Budgets*)

Berdasarkan jenis aktivitasnya, anggaran dibagi menjadi anggaran operasional dan anggaran modal.

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran operasional ini juga dikelompokkan sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*), yaitu jenis pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil serta tidak menambah fungsi suatu 13sset. Anggaran modal (*capital budget*) menunjukkan rencana kerja jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti peralatan, kendaraan,

perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah asset atau kekayaan organisasi yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya.

2. Anggaran berdasarkan pengesahan (*tentative enacted budgets*)

Berdasarkan status hukumnya, anggaran dibagi menjadi dua yaitu anggaran tentatif (*tentative*) dan anggaran *enacted*.

- a. Anggaran tentatif adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.
- b. Anggaran *enacted* adalah anggaran yang direncanakan, kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislative.

3. Anggaran dana umum dan anggaran dana khusus (*general and special budgets*)

Dana umum digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari sedangkan dana khusus dicadangkan /dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu.

4. Anggaran tetap dan anggaran fleksibel (*fixed and flexible budget*)

Dalam anggaran tetap, apropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan. Dalam anggaran fleksibel, harga barang/jasa per unit telah ditetapkan. Namun,

jumlah anggaran secara keseluruhan akan berfluktuasi bergantung pada banyaknya kegiatan yang dilakukan.

5. Anggaran eksekutif dan anggaran legislative (*executive and legislative budget*)

Anggaran penyusunannya, anggaran dapat dibagi menjadi anggaran eksekutif, dalam hal ini pemerintah serta anggaran legislative (*legislative budget*), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislative tanpa melibatkan pihak eksekutif. Selain itu, ada juga yang disebut anggaran bersama (*joint budget*), yaitu anggaran yang disusun secara bersama-sama antara lembaga eksekutif dan legislative.

2.1.4 Fungsi Anggaran

Anggaran memiliki 4 fungsi pokok yang terdiri dari : (Nafarin, 2015)

1. *Planning* (perencanaan)

Dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumberdaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut.

3. *Actuating* (Menggerakan)

Setelah sumberdaya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang

telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

4. *Controlling* (Pengendalian)

Setelah sumberdaya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai.

2.1.5 Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran adalah sebagai berikut (Suhardi, 2019).

1. Untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara formal dan jelas, sehingga dapat memberikan arah mana yang hendak dicapai oleh perusahaan/organisasi.
2. Untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan anggaran ini, sehingga benar benar dapat dilaksanakan.
3. Untuk menyediakan rencana secara terperinci mengenai aktivitas/ kegiatan, pada periodetertentu sehingga dapat mengurangi terjadinya ketidakpastian dalam mencapai suatu tujuanyang diinginkan perusahaan/organisasi.
4. Untuk mengkoordinasikan cara yang akan ditempuh dalam memaksimalkan sumber daya.

5. Sebagai alat ukur dalam pengendalian kinerja karyawan/departemen.

2.1.6 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh pemerintah. SAP 2010 (2011: 331) menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu (Mahmudi, 2016:153).

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah negara/daerah. Belanja (basis kas) adalah suatu pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2.1.7 Klasifikasi Belanja

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi (Abdul Halim, 2012) .

- a) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang di dasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ini

meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer.

- b) Klasifikasi organisasi, yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.
- c) Klasifikasi fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan pemukiman.

Menurut jenis belanja Pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah :

a) Belanja Pemerintah Pusat

- 1. Belanja Pegawai
- 2. Belanja Barang
- 3. Belanja Modal
- 4. Pembayaran Bunga Utang
- 5. Subsidi
- 6. Hibah
- 7. Bantuan Sosial
- 8. Belanja Lain-Lain

b) Transfer ke Daerah

1. Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus)
2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

2.1.8 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 15 Tahun 2011. Di sini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota didefinisikan. KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan pemilu di provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (7), sedangkan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (8). Pemerintah pusat di Indonesia membentuk lembaga-lembaga yang terpisah, namun beroperasi secara otonom.

Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah : “Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/Kota. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu pada tahun 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan. Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca orde baru.

Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan – badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber.

2.1.9 Fungsi, Wewenang dan Tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5), disana diatur bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Melaksanakan tugas pokoknya, KPU memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 8, yaitu:

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu :
 - 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
 - 2) Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilihan umum
 - 3) Melaksanakan sosialisasi pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :
 - 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
 - 2) Melaksanakan sosialisasi dan penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat
 - 3) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- c. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu gubernur, bupati dan walikota, yaitu :
 - 1) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah

- 2) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan
- 3) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan.

2.1.10 Jenis Belanja pada Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga non kementerian memiliki jenis belanja sebagai berikut (Kemenkeu, 2021)

- a) Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.
- b) Belanja barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang ini terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa adalah pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan/penggantian peralatan kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok fungsi kementerian atau lembaga, pengadaan kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum

yang diatur pemerintah pusat dan pengeluaran jasa non fisik (contoh biaya pelatihan dan penelitian).

c) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila :

1. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan asset tetap atau asset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
2. pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. perolehan asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
4. pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan asset tetap atau asset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume asset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi asset tetap/asset lainnya.

Ada 5 (lima) kategori utama belanja modal (Kemenkeu, 2021).

1. belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan,

pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta lain-lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak tanah dan sampai tanah tersebut siap pakai.

2. belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal termasuk biaya untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan.
4. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari asset tetap yang sudah ada. Misalnya gedung direnovasi sehingga menambah umur ekonomis gedung tersebut.
5. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan asset tetap yang sudah ada misalnya peningkatan kapasitas generator listrik.

2.1.11 Kinerja

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2018: 142). Kinerja merupakan hasil kerja atau perbandingan secara kualitas dan kuantitas baik yang bersifat fisik atau mental, fisik atau non mental, gambaran kondisi keuangan perusahaan baik menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan perusahaan.

2.1.12 Kinerja Anggaran Belanja

Anggaran kinerja sektor publik adalah sistem penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan ouput dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapain outcome dari output tersebut (Halim, 2017:17).

Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah di tetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau strategi, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Berdasarkan informasi pada laporan realisasi anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa (Mahmudi, 2016:156) .

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran dengan realisasinya yang bias dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu selisih disukai (*favourable variance*) dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapat yang seimbang

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

- a) Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang.
- b) Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Berbeda dengan belanja operasi yang bersifat jangka pendek dan rutin, pengeluaran belanja modal yang

dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang.

4. Rasio efisiensi belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nuri Andriyani (1), Mukhzaedfa (2) dan Enggar Diah PA(3). Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi. Vol 5, No. 2 April-Juni 2020	Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal (Studi kasus di Kabupaten/kota Provinsi jambi tahun 2014-2018	Berdasarkan hasil penelitian yang tercermin dalam realisasi APBD-P, rerata PAD kabupaten/kota Provinsi Jambi tahun 2014-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 17,59% walaupun persentase tersebut jika dikategorikan masih dalam kategori rendah, peningkatan PAD tersebut tetap merupakan salah satu sumber penerimaan yang turut berkontribusi dalam pembiayaan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota se Provinsi Jambi.	Persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu mengenai anggaran pemerintah	Perbedaannya terletak pada objek yang dibahas, penelitian terdahulu membahas tentang keuangan daerah terhadap belanja modal sedangkan penelitian ini membahas tentang anggaran belanja pada komisi pemilihan umum (KPU).

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	Hendri Koeswara (1), Ira Irawati (2), dan Arry Bainus (3). Jurnal Borneo Administrator. Vol 14 (2018)	Analisi Anggaran Pelaksanaan Pemilihan Walikota Solok Pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran pemilihan kepala daerah secara serentak di kota solok provinsi sumatera selatan tahun 2015 telah berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam tahapan yang terdapat dalam siklus penganggaran, yaitu Budget Preparation and Formulation (Persiapan dan Formulasi Anggaran) dan Legislative Review and Approval (Pembahasan dan Persetujuan oleh Lembaga Legislatif).	Dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dan mendeskripsikan setiap masalah dan variabel penelitian.	Penelitian objek yang dilakukan oleh peneliti lebih luas cakupannya sedangkan dalam penelitian terdahulu hanya mengarah pada satu objek.

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Juharsa (1), Natalia Paranoan (2) dan Sita Yubelina Sabandar (3). Paulus Journal Of Management Research. Vol 1, Issue 1, April 2021	Analisis Kinerja Sumber daya Manusia Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam Pengelolaan Anggaran tahun 2019	Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran memiliki hubungan yang kuat dalam meningkatkan penyerapan anggaran di jajaran Bawaslu pada umumnya dan Bawaslu Kabupaten pada umumnya. Sumber Daya Manusia yang berkualitas, didukung beberapa faktor atau latar belakang berupa pendidikan, pengembangan diri berupa bimbingan dan pelatihan, dan diutamakan mempunyai pengalaman di bidang kepemiluan.	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu teletak pada objek yang diteliti yaitu mengenai anggaran	Perbedaan pada penelitian ini teletak pada topik yang dibahas, penelitian terdahulu membahas tentang kinerja sumber daya manusia bawaslu, sedangkan penelitian ini membahas tentang anggaran belanja pada kimisi pemilihan umum (KPU).

No	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Eka Meiliya Dona dan Verza Ayu Lestari. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol 5 No. 2 (November 2020)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU-Sumatera Selatan	Hasil penelitian bahwa berdasar objek Kantor Badan Pendapatan daerah kabupaten OKU-Sumatera Selatan, di analisis dari laporan realisasi anggaran 2013-2017 dengan menggunakan tingkat ekonomi, efisien dan efektivitas.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang keuangan kinerja anggaran.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis metode penelitian deskriptif kuantitatif sedangkan metode yang di gunakan peneliti yaitu metode kualitatif.
5.	Aqnul Muhamad Akbar (1), Burhanuddin (2) dan Guasmin (3). Jurnal Kolaboratif Sains. Vol 03, No. 08 (November 2020)	Ananlisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal Pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi tengah	Hasil penelitian bahwa Dinas Cipta dan SDA Provinsi Sulteng dalam hal pengelolaan anggaran belanja modal terhitung tahun 2016-2018 sudah sesuai dengan UU. No. 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah	Sama-sama menggunakan objek berupa anggaran	Data yang dipeorleh berasal dari uji kualitas data sedangkan peneliti data yang digunakan berasal dari hasil survei dan wawancara

Sumber: Penelitian Terdahulu 2025

2.3 Kerangka Konseptual

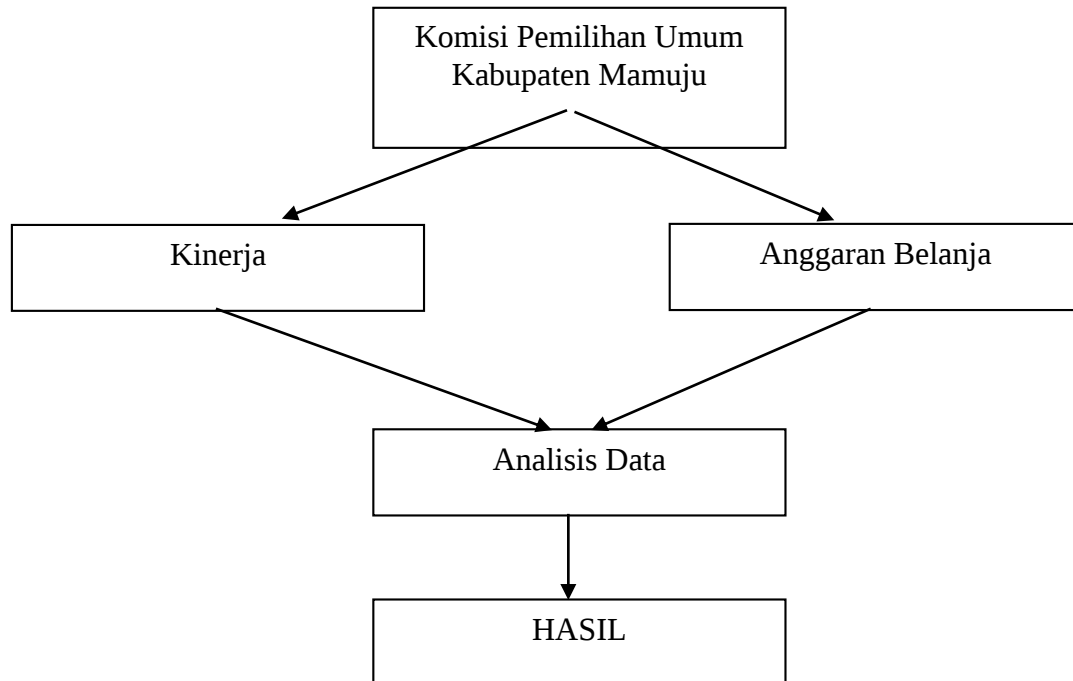
Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu instansi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu. Anggaran memiliki peran penting dalam penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan dan berfungsi sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Salah satunya pada aktivitas belanja instansi. Belanja didefinisikan sebagai semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja yang merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah rentan akan terjadinya inefisiensi dan kesalahan dalam penggunaannya, serta merupakan komponen yang penting bagi masyarakat selaku pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak daerah untuk mengetahui dan menilai apakah anggaran belanja yang dikelola pemerintah telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Meskipun anggaran belanja pemerintah daerah idealnya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pada praktiknya masih sering ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi anggaran. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa penyerapan anggaran yang tidak optimal, ketidakefisienan belanja, serta kurangnya keserasian dalam alokasi

belanja terhadap kebutuhan prioritas publik. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti pelaksanaan kinerja anggaran pada pemerintah daerah secara umum, namun kajian yang menitikberatkan pada analisis kinerja anggaran belanja dengan pendekatan analisis varians, pertumbuhan, keserasian, serta rasio efisiensi masih terbatas, khususnya pada lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melakukan perbaikan, dengan menganalisis kinerja anggaran belanja KPU Kabupaten Mamuju pada periode 2019–2023, sehingga dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja telah dijalankan sesuai tujuan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik.

Adapun kerangka konseptual dapat dilihat di bawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju tahun 2019–2023 secara umum berada dalam kondisi yang baik. Hal ini tercermin dari pencapaian target anggaran yang relatif sesuai dengan perencanaan serta realisasi anggaran yang terkendali. Pertumbuhan anggaran selama periode penelitian menunjukkan kondisi yang fluktuatif atau naik-turun, yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional rutin maupun non-operasional, khususnya kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum dan aktivitas pendukung lainnya.

Dari sisi efisiensi, anggaran KPU Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan efisien karena realisasi anggaran tidak melebihi pagu yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dalam membatasi pengeluaran agar tetap sesuai kebutuhan tanpa menimbulkan pemborosan. Meskipun demikian, fluktuasi pertumbuhan anggaran mengindikasikan adanya faktor eksternal yang memengaruhi, terutama pada tahun-tahun politik. Oleh karena itu, diperlukan strategi penganggaran yang lebih adaptif serta perencanaan yang matang agar kinerja anggaran tetap stabil dan mampu

mengantisipasi kebutuhan baik pada periode pemilihan umum maupun periode non-politik.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Komisi Pemilihan Umum, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan anggaran agar lebih adaptif terhadap perubahan kondisi, terutama pada tahun politik yang cenderung membutuhkan alokasi dana lebih besar dibandingkan tahun non-politik. Perencanaan yang matang akan membantu menjaga stabilitas kinerja anggaran meskipun menghadapi dinamika kebutuhan yang fluktuatif.
2. KPU Kabupaten Mamuju perlu terus memperkuat aspek pengendalian dan evaluasi anggaran secara berkala agar efisiensi yang telah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Evaluasi yang konsisten akan membantu mengidentifikasi potensi pemborosan dan memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta mendukung tujuan kelembagaan.
3. KPU Kabupaten Mamuju perlu untuk memperhatikan faktor eksternal yang dapat memengaruhi pertumbuhan anggaran, baik yang bersifat operasional maupun non-operasional. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, KPU dapat menyusun strategi penganggaran yang lebih responsif dan mampu mengantisipasi risiko ketidakseimbangan anggaran.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan analisis komparatif antar daerah atau menambahkan variabel lain seperti efektivitas dan akuntabilitas anggaran. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja pengelolaan anggaran pada lembaga penyelenggara pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad K., (2015). *Akuntansi Manajemen: Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad, Z., Dongoran, E. A., Zikra, S. A., & Laila, N. (2025). Strategi penganggaran berbasis kinerja dalam akuntansi manajemen untuk meningkatkan hasil keuangan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1).
- Akbar, A. M., & Burhanuddin, G. (2020). Analisis efektivitas pengelolaan anggaran belanja modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(8).
- Andriyani, N., Mukhzarudfa, & Enggar, D. P. A. (2020). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap belanja modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi tahun 2014–2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132–144.
- Deddi, N (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta : Salemba Empat.
- Dewi, R. (2021). Pengaruh Kemampuan Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bina Buana Semesta. *Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*. 16 (1). 19-25
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 135–144.

- Fahmi, I. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Jessy Langi, L. L. (2022). Implementasi laporan anggaran dan realisasi belanja negara pada Universitas Negeri Manado. *Journal of Management*.
- Juarsa, N. P., & Sabandar, S. Y. (2021). Analisis kinerja sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Mamasa dalam pengelolaan anggaran tahun 2019. *Paulus Journal of Management Research*, 1(1).
<https://doi.org/10.20956/6bskzf37>
- Koeswara, H., Irawati, I., & Bainus, A. (2018). Analisis anggaran pelaksanaan pemilihan Walikota Solok pada Pilkada serentak nasional tahun 2015. *Jurnal Borneo Administrator*, 14(3).
- Mahmudi. (2016). Buku akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UII Press.
- Mamengko, D.N (2022). Pelaporan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi Epra (Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran) Di Kabupaten Minahasa. *Sibatik Journal* Vol.2(1)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mukhtazar, (2020). *Prosedur penelitian pendidikan* (Jakarta: Absolute media) .63
- Muhammad, P. N. (2022). Analisis kinerja anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018–2020. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 5(2). *Edunomika*, 2(6), 5–6.

- Nafarin, M. (2015). *Penganggaran perusahaan* (Edisi ke-3, Cet. 2, Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, F. Y. K., dkk. (2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi tahun anggaran 2014–2018. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 15, 443–450.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rudianto. (2016). *Penganggaran Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta: Erlangga
- Sartika, N. (2019). Analisis rasio keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah Kepulauan Meranti. *Jurnal Inovasi Bisnis*, 7.
- Sasongko, C., & Parulian, S. R. (2020). *Anggaran* (Cet. 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. (2019). *Budgetting perusahaan, koperasi, dan simulasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Warnaningtyas, H. (2019). *Penganggaran Perusahaan*. Lakeisha.
- Zellatifanny, M. C., Mudjiyanto, B., & Aptika, P. (2018). Penelitian deskriptif dalam ilmu komunikasi: The type of descriptive research in communication study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83.

DAFTAR PUSTAKA WEBSITE

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). *Ringkasan APBD TA 2017*.

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2023). Klasifikasi anggaran.

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/publikasi-kemenkeu/klasifikasi-anggaran.html>

Kumparan. (2023). Ungkap kasus korupsi Rp1,8 M di KPU Sulbar, polisi tetapkan 9

tersangka. <https://kumparan.com/sulbarkini/ungkap-kasus-korupsi-rp-1-8-m-di-kpu-sulbar-polisi-tetapkan-9-tersangka-1xQENS7zINV>

BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat. (2023). Kasus dugaan korupsi di KPU Sulbar, polisi

tetapan sembilan tersangka. <https://sulbar.bpk.go.id/kasus-dugaan-korupsi-di-kpu-sulbar-polisi-tetapan-semilan-tersangka/>

Sulbar Express. (2023). KPU Sulbar berharap tak terjerat persoalan hukum.

<https://sulbarexpress.fajar.co.id/2023/08/10/kpu-sulbar-berharap-tak-terjerat-persoalan-hukum/>

BPK RI. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>